

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga dikenal sebagai "Pilkada", adalah proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah administratif yang memenuhi syarat untuk memilih pasangan calon mereka. Partai politik, gabungan partai politik, atau calon individu dapat mengusulkan calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah untuk maju dalam pilkada ini. Kepala daerah memegang jabatan politik untuk memimpin dan mengarahkan roda pemerintahan di tingkat lokal, dan pilkada merupakan bagian dari praktik demokrasi.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada masa sebelum reformasi itu dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi dari rakyat daerah. Sistem tersebut sering dianggap kurang mencerminkan keinginan langsung dari rakyat karena hal tersebut didominasi oleh peran DPRD, Karena proses pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme representatif, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat seperti yang diterapkan setelah reformasi.

Setelah reformasi, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, dengan demikian pertanggungjawaban kepala daerah bukan kepada DPRD lagi, tetapi kepada rakyat dengan melalui DPRD.

Pergeseran cara pemilihan langsung kepala daerah memengaruhi pertanggungjawaban kepala daerah secara sosio-yuridis. Jika seorang kepala daerah dianggap kurang serius dalam memajukan pembangunan daerah, persepsi publik secara otomatis menjadi kurang baik, yang berdampak pada citra figur kepala daerah yang akan maju kembali di pemilihan berikutnya. Sebaliknya, jika seorang kepala daerah dianggap serius dalam memajukan pembangunan daerah, maka mereka akan membangun citra positif bagi petahana untuk dipilih kembali oleh

rakyat, karena rakyat dapat memberikan hukuman secara politik untuk tidak memilih kembali kepala daerah petahana.

Pilkada yang dilakukan secara langsung di Jakarta baru di gelar pada tahun 2007 kemudian dilanjutkan pada 2012 dan 2017. Dalam tiga kali Pilkada tersebut, dua Pilkada diramaikan lebih dari dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wagub yakni pada 2012 dan 2017. Hanya sekali Pilkada Jakarta diikuti dua paslon yakni pada 2007.

Meskipun pilkada DKJ secara langsung baru diadakan secara 3 kali, Pilkada DKJ selalu menjadi peristiwa politik yang menarik perhatian di tingkat lokal dan nasional. DKI memiliki peran strategis yang sangat penting dalam kemajuan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia sebagai ibu kota negara. Keputusan yang diambil oleh gubernur terpilih memiliki dampak pada kebijakan nasional, serta masyarakat kota Jakarta. Oleh karena itu, pemilihan gubernur DKJ sering kali menjadi arena politik yang penuh persaingan karena siapa pun yang terpilih akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur perpolitikan Indonesia.

DKJ adalah kota yang dinamis dengan populasi yang beragam, masalah perkotaan yang kompleks, dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Kompleksitas ini membutuhkan figur pemimpin yang dapat memahami berbagai masalah yang dihadapi kota sekaligus mengelola harapan publik yang seringkali berbeda. Oleh karena itu, proses pencalonan gubernur DKJ melibatkan banyak faktor, termasuk kekuatan politik yang mendukung calon, popularitas masyarakat, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang penting bagi warga kota.

Namun, tantangan yang dihadapi Jakarta sangat kompleks, mencakup kemacetan lalu lintas, banjir, kepadatan penduduk, dan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, figur gubernur yang kompeten, visioner, dan inovatif sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan kota ini. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, gubernur juga harus mampu mengelola dinamika sosial-politik dan merespons aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang inklusif.

Salah satu figur yang paling menonjol dalam politik DKJ adalah Anies Baswedan. Sebelum akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon Gubernur DKJ pada Pilgub 2017, Anies pertama kali mencuri perhatian dalam kancah politik nasional sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan dukungan dari koalisi partai politik saat itu, yang terdiri dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anies Baswedan berhasil memenangkan kontestasi Pilgub tersebut. Baik di tingkat lokal maupun nasional, Anies Baswedan memperkenalkan banyak kebijakan selama jabatannya sebagai gubernur.

Kemudian pada saat bertugas sebagai Gubernur DKJ (2017-2022), Anies dipilih oleh para gubernur se-Indonesia untuk menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Dia juga dipilih oleh C-40 (Asosiasi kota besar sedunia) menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah C-40 bersama Wali Kota London dan Gubernur Tokyo. Anies menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki posisi kepemimpinan pada asosiasi tersebut. Dan di akhir masa jabatannya, 84% rakyat Jakarta menyatakan sangat puas atas kepemimpinannya. Sebuah rekor di Jakarta, angka kepuasan yang amat tinggi.

Program dan kebijakan yang diterapkan oleh Anies Baswedan banyak mendapatkan pujian misalnya, Pembangunan stadium internasional yaitu Jakarta International Stadium, kemudian Pembangunan RPTRA, kemudian terkait transportasi umum seperti Jaklingko, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, beberapa program tersebut merupakan program atau kebijakan yang diterapkan dalam masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, dan program atau kebijakan tersebut banyak menuai hasil positif, dan Masyarakat banyak yang merasa puas atas kebijakan tersebut.

Tingginya elektabilitas Anies Baswedan bisa kita lihat dalam beberapa survey yang dilakukan oleh beberapa Lembaga survey, misalnya saja survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Hasil survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Anies tertinggi sebagai bacagub Jakarta melalui simulasi top of mind Pilkada Jakarta 2024. (Setiawan, 2024)

Berikut hasil survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia

1. Anies Baswedan: 39,7 persen
2. Basuki Tjahaja Purnama: 23,8 persen
3. Ridwan Kamil: 13,1 persen

Kemudian selain dari survey yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia terkait tingginya elektabilitas Anies Baswedan, ada juga survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap beberapa tokoh menjelang Pilkada 2024, dan nama Anies Baswedan tetap menjadi tertinggi dalam survey elektabilitas yang dilakukan. (Sihombing, 2024)

Berikut hasil survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas

1. Anies Baswedan 29,8%
2. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok 20,0%
3. Ridwan Kamil 8,5%

Ada sejumlah alasan mengapa elektabilitas Anies Baswedan sangat tinggi. Pertama, gaya kepemimpinan Anies sering dianggap mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Pendekatan humanis dan komunikatif Anies sering kali menjadi daya tarik utama bagi pemilih Jakarta yang beragam. Dianggap bahwa Anies dapat merangkul berbagai kelompok, mulai dari komunitas kota hingga kelompok religius, serta memiliki retorika politik yang kuat dan dapat diukur. Anies memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pemilih muda dan kelas menengah ke atas yang mendambakan perubahan karena dia dapat berinteraksi dengan orang dari berbagai lapisan masyarakat.

Kedua, banyak orang menganggap Anies sebagai pemimpin yang independen dan jujur. Anies sering kali menunjukkan dirinya sebagai figur yang independen dalam pengambilan keputusan, meskipun dia diusung oleh partai politik dalam Pilgub 2017. Dilihat bahwa kebijakannya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mencerminkan upaya untuk memperbaiki DKI secara keseluruhan tanpa terlalu terikat pada kepentingan politik tertentu. Kepercayaan publik telah meningkat dengan cara ini, terutama di kalangan kelompok yang menginginkan pemimpin yang berkonsentrasi pada kebijakan daripada agenda politik.

Selain itu, dapat dianggap bahwa elektabilitas tinggi Anies adalah hasil dari pendekatan konsistennya terhadap berbagai masalah politik dan sosial di Jakarta. Anies sering tampil sebagai orang yang menawarkan solusi untuk masalah warga Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan akses perumahan. Meskipun belum semua masalah tersebut diselesaikan secara optimal, kemampuan Anies untuk menyampaikan masalah dan mencoba mencari solusi dipandang sebagai keuntungan bagi masyarakat.

Meskipun begitu, Dalam Pilgub DKI tahun ini, tingginya elektabilitas Anies Baswedan menimbulkan banyak pertanyaan tentang hubungan antara popularitas seorang calon dan proses politik di sekitarnya. Biasanya elektabilitas sering kali menentukan kontestasi politik di Indonesia, khususnya di Jakarta. Partai politik biasanya tertarik pada kandidat dengan elektabilitas tinggi karena mereka ingin mendukung tokoh-tokoh populer untuk meningkatkan peluang mereka untuk menang. Tetapi dalam kasus kali ini malah berbeda dari biasanya, karena meskipun Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi partai politik malah terkesan tidak melirik nya sama sekali sehingga mengakibatkan Anies Baswedan gagal untuk maju dalam pilkada DKI 2024.

Terlepas dari dinamika politik yang terjadi pada Pilkada DKI, Pilkada DKI Jakarta tetap merupakan pencerminan dari semangat demokrasi dan harapan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik. Pemimpin yang terpilih tidak hanya diharapkan mampu menyelesaikan masalah perkotaan secara teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kesuksesan Anies Baswedan dalam meningkatkan kepuasan masyarakat menunjukkan pentingnya kebijakan yang berbasis kebutuhan rakyat, bukan hanya agenda politik.

Dan Pada akhirnya, Pilkada DKI Jakarta adalah lebih dari sekadar proses pemilihan pemimpin lokal, tetapi adalah cerminan dari harapan masyarakat terhadap pemimpin yang dapat membawa perubahan nyata dan mewujudkan keadilan sosial. Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan kota, menjadikan

demokrasi lebih bermakna, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan.

1.2 Rumusan masalah

Penelitian ini berfokus pada analisis hambatan yang dihadapi Anies Baswedan dalam pencalonannya pada Pilgub DKI Jakarta, meskipun memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Meskipun dukungan publik terhadap Anies Baswedan terlihat signifikan, berbagai tantangan, baik dari aspek politik, regulasi, maupun dinamika partai pendukung, muncul dan memengaruhi proses pencalonannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan adanya hambatan tersebut dan bagaimana hal ini memengaruhi perjalanan pencalonan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada, terlepas dari tingginya popularitas yang ia miliki.

Kegagalan ini dapat ditelusuri melalui berbagai faktor yang memengaruhi perjalanan pencalonannya. Dinamika koalisi partai pendukung, terjadinya konflik kepentingan di antara elite politik, dan pengaruh dari aktor atau elite politik lainnya yang menjadi tantangan utama yang menghambat proses pencalonan Anies Baswedan.

Kegagalan pencalonan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 memiliki dampak terhadap Peta koalisi yang ada di DKJ, pada saat sebelum terjadinya kegagalan pencalonan Anies Baswedan, terdapat 3 partai politik yang mengukung beliau yaitu, PKS, NASDEM, PKB, Partai Buruh dan anggota dari KIM PLUS hanya berjumlah 12 yaitu, Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN, dan Garuda, sementara PDIP berkoalisi dengan Partai Hanura, dan Partai Ummat. Setelah terjadi kegagalan pencalonan yang dialami oleh Anies Baswedan,

Peta koalisi pun berubah terutama dalam peta koalisi Kim, yang dimana 3 partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan yaitu, PKS, NASDEM, PKB, ikut bergabung dalam koalisi Kim tersebut sehingga dalam koalisi Kim terdapat 15 partai yaitu Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN, dan Garuda. Sementara partai buruh absen dari

pilkada DKJ tahun 2024 ini, dan untuk koalisi yang dipimpin oleh PDIP tidak ada yang berubah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat di Tarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Mengapa terjadi kegagalan dalam pencalonan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024?
2. Bagaimana dampak kegagalan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 terhadap peta koalisi dalam pilkada Daerah Khusus Jakarta?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada kemajuan penelitian ilmu politik, terutama dalam hal pemahaman tentang proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah DKJ. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor politik, sosial, dan institusional yang memengaruhi proses mencalonkan diri Anies Baswedan sebagai gubernur, meskipun dia memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi.

1.4.2 Tujuan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi partai politik dan calon kepala daerah tentang bagaimana mengelola dukungan publik dan koalisi politik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membantu calon kepala daerah menghadapi tantangan politik yang mungkin muncul, meskipun memiliki popularitas tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada akademisi di bidang politik tentang bagaimana popularitas calon, dinamika partai pendukung, dan pengaruh elit politik pada pemilihan kepala daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah Penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi partai politik dan calon dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, dengan menunjukkan pentingnya faktor-faktor politik seperti koalisi partai dan dinamika dukungan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu para praktisi politik dan pengamat untuk lebih memahami tantangan yang mungkin muncul dalam pencalonan politik, bahkan bagi calon yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci sebuah penelitian terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian diperlukannya susunan sistematis dalam mempermudah poin penting dari permasalahan dan menyimpulkannya. Oleh karena itu pada sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran bab perbab dari bagian yang sedang dibahas. Sebagai langkah mendiskripsikan penelitian penulis berjudul, “ **KEGAGALAN ANIES BASWEDAN MENJADI CALON GUBERNUR DKJ DALAM PILKADA TAHUN 2024.**” Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Di BAB I ini adalah pendahuluan di mana awal dari pembahasan di mulai. Pada bab ini dipaparkan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab ini juga memaparkan secara garis besar tentang pembahasan permasalahan apa yang ingin penulis lakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di BAB II ini adalah tinjauan pustaka, bab II ini juga memaparkan kajian pustaka yang juga berkaitan dengan literatur terdahulu yang relevan, landasan teori dan idetual, pada bab ini penulis juga menggunakan teori dari Geoffrey Pridham C. Wright Mills.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Di BAB III ini merupakan pembahasan terkait dengan metode penelitian, yang di dalamnya membahas mengenai pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, hasil dari wawancara informan, teknik pengelohan dan analisa data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian, dan jenis dan sumber data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Di BAB IV ini merupakan pembahasan terkait dengan Sejarah Kota Jakarta dan juga pilkada yang terjadi di kota jakarta yang dijabarkan oleh penulis.

BAB V: KEGAGALAN BASWEDAN MENJADI CALON GUBERNUR DALAM PILKADA DKJ TAHUN 2024

Di BAB V ini V ini penulis menjelaskan secara terperinci terkait dengan pembahsan, dan menjawab rumusan masalah yang telah penulis paparkan. Membahas tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Anies Baswedan untuk maju menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKJ tahun 2024 dan membahas secara terperinci terkait dampak kegagalan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Daerah Khusus Jakarta 2024 terhadap peta koalisi dalam pilkada Daerah Khusus Jakarta

BAB VI: PENUTUP

Di BAB VI ini merupakan uraian pembahasan terkait dengan kesimpulan hasil dari penelitian penulis.